



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PANDU YUNianto**
2. Jabatan : **SEKRETARIS BADAN**
3. NHK : **260351**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.185.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.001.000.000
2. Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.701.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 721.000.000
5. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000
6. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000
7. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 283.750.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN COROLA ALTIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 520.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	769.724.817
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	7.158.474.817
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.158.474.817

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.